



---

## OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT NELAYAN BATAM DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI

Hendro Wibowo, Efri S. Bahri, Prayogo Prasadjo Harto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) SEBI, Indonesia

Email: [hendro.wibomo83@gmail.com](mailto:hendro.wibomo83@gmail.com)

---

Naskah diterima: 3 Mei 2016, direvisi: 27 Mei 2016, disetujui: 24 Juni 2016

---

### Abstract

*This study was conducted to explore more about the role of Batam fishing communities in developing economic potential so as to improve the quality of life of fishing communities. This research was conducted at the Kelompok Nelayan Abadi, with 20 members of the fishing community of childbearing age, with fixtures and fittings are traditional fishing. This study uses qualitative research methods types of Participatory Rural Appraisal (PRA). This method is used to get information from the community and the parties participating in community empowerment. The results showed that the fishing community empowerment can be realized in the form of giving confidence for the development of local capabilities on the basis of local needs. Strengthening the role of the fishing communities as agents of development can be done through mentoring programs, in addition to the development of the organization, the network economy, and other supporting factors. Through community development efforts so that fishing communities have the opportunity to escape poverty and backwardness towards a better life.*

*Keywords: optimization; the role of the community; the fishing community*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menggali lebih dalam tentang peran masyarakat nelayan Batam dalam mengembangkan potensi ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan. Penelitian ini dilakukan pada *Kelompok Nelayan Abadi*, yakni pada 20 anggota masyarakat nelayan usia produktif, dengan perlengkapan dan peralatan melaut yang tradisional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini dipergunakan untuk menggali informasi dari masyarakat dan pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan demi berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat. Penguatan peran serta masyarakat nelayan sebagai pelaku pembangunan dapat dilakukan melalui program-program pendampingan, di samping melalui pengembangan organisasi, ekonomi jaringan, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Melalui usaha pemberdayaan masyarakat yang demikian itu, masyarakat nelayan memiliki peluang untuk bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju kehidupan yang lebih baik.

**Kata kunci:** optimalisasi; peran masyarakat; masyarakat nelayan

**Pengutipan:** Wibowo, H., Bahri, E. F., Harto, P. P. (2016). Optimalisasi Peran Masyarakat Nelayan Batam dalam Pengembangan Ekonomi. *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3(1), 2016, 92-104. doi:10.15408/sd.v3i1.3800.

**Permalink/DOI:** <http://dx.doi.org/10.15408/sd.v3i1.3800>

## A. Pendahuluan

Dari visi dan misi Pemerintah Periode 2015-2019, pembangunan tahun 2015 diarahkan sebagai tahap penguatan fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan, yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdaya dalam ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Program Nawa Cita, dalam hal ini penulis menggarisbawahi tiga poin, yakni: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional, dan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.<sup>1</sup> Selain itu, peneliti juga ingin menggarisbawahi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, bahwa guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka dituangkan visi pembangunan, yakni mewujudkan Negara Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.<sup>2</sup>

Masyarakat nelayan identik dengan kemiskinan, banyak hal yang menyebabkannya, antara lain kurangnya modal yang dimiliki para nelayan, rendahnya teknologi yang dimiliki, rendahnya akses pasar, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam. Selain itu terdapat penyebab lain yang bersifat non ekonomi, atau biasa disebut faktor social, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, rendahnya tingkat pendidikan, dan rendahnya tingkat kesehatan serta alasan lain seperti sarana dan prasarana umum di wilayah pesisir. Kurangnya perencanaan spasial yang mengakibatkan tumpang tindihnya beberapa sektor suatu kawasan, polusi, dan kerusakan lingkungan.

Kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia terkenal dengan kekayaan dan keanekaragaman jenis sumber daya alamnya baik sumber alam yang dapat pulih (*Renewable*) maupun yang tidak dapat pulih (*Un-renewable*). Sumber daya alam

pulau-pulau kecil bila dipadukan dengan sumber daya manusia yang handal serta di dukung dengan iptek yang di tunjang dengan kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan yang tepat bisa menjadi modal yang besar bagi pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Peluang yang dimiliki adalah kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang potensial untuk dikembangkan pelayannya. Sumber daya alam pulau-pulau kecil mempunyai arti penting bagi kegiatan perikanan, konservasi dan preservasi lingkungan, wisata bahari dan kegiatan jasa lingkungan lain yang terkait. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 km.<sup>4</sup> Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir menjadi andalan sumber pendapatan masyarakat Indonesia. Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung potensi pembangunan yang tinggi. 85 % kehidupan biota laut tropis bergantung pada ekosistem pesisir dan 90 % hasil tangkapan ikan berasal dari laut dangkal dan pesisir.

Batam merupakan salah satu daerah bahari di propinsi Kepulauan Riau dengan wilayah seluas 251.810,71 KM<sup>2</sup> (25.181.071 Ha). Sedangkan berdasarkan batas luas wilayah terluar Kabupaten/Kota sejauh 4 mil laut sehingga luas Kota Batam sebesar 390.900 Ha.<sup>5</sup> Sebagai salah satu Kota yang mempunyai karakteristik wilayah kepulauan, Kota Batam memiliki beberapa pulau besar (Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Bintan, Pulau Natuna dan Pulau Bulan). Kota Batam yang memiliki garis pantai sepanjang 172 km itu diperkirakan memiliki potensi pengembangan budidaya laut seluas 61.131,8 ha, yang terdiri dari 10.709,7 ha untuk coastal marine culture dan 50.422,0 ha untuk offshore marine culture. Kawasan laut yang berpotensi untuk pengembangan coastal marine culture tersebar di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Galang, Kecamatan Kuala Kampar, Kecamatan Bulang, Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Nongsa.

1 Suplemen Rencana Kerja Pemerintah, Bappenas 2015.  
2 Buku 1 Agenda Pembangunan Nasional, Bappenas 2014.

3 Anggoro, 2000.  
4 KKP, 2014.  
5 Perda Kota Batam No. 2 Tahun 2004.

Tabel 1. Lokasi Potensial untuk Pengembangan Marikultur Pesisir Kota Batam<sup>6</sup>

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas Potensial (ha)
1	Galang	Selat antara Pulau Galang Baru dengan Pulau Ngal; Utara Pulau Tanjung Dahan dan Pulau Galang	1.011,90
2	Kuala Kampar	Barat daya Pulau Rempang	304,61
3	Bulang	Sekitar Pulau Setoko dan Pulau Tonton; antar Pulau Awi dan Pulau Tonton	349,37
4	Belakang Padang	Antara Pulau Belakang Padang dengan Pulau Kepalajerih	6.094,24
5	Nongsa	Sekitar Pulau Tanjung Sau dan Pulau Nginang	2.949,61
Total			10.709,73

Secara geografis, Kota Batam merupakan wilayah yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sementara pada sisi yang lainnya berbatasan dengan beberapa daerah lainnya, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Jambi dan Kalimantan Barat.<sup>7</sup> Seiring dengan banyaknya peluang usaha di wilayah Kota Batam telah muncul permasalahan-permasalahan pembangunan, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang over eksploitasi dan tidak bertanggung jawab.

Permasalahan-permasalahan yang muncul secara umum disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu terjadinya perubahan alam dan adanya aktifitas manusia. Akan tetapi permasalahan yang terbesar pada kenyataannya disebabkan oleh adanya aktifitas yang dilakukan manusia seperti kerusakan ekosistem yang banyak terjadi di wilayah-wilayah pesisir.

Eksploitasi yang berlebihan dan aktifitas manusia lainnya menyebabkan penurunan kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam termasuk berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu ditemukan konflik antar stakeholder

yang masih sering terjadi akibat tumpang tindih kepentingan dalam pemanfaatan ruang pesisir. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam hal pengelolaan kawasan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan menyeluruh terhadap penataan ruang dan pengelolaan kawasan yang berimbang.

Konflik masalah penentuan batas antarwilayah secara spasial maupun pengelolaan kawasan serta pemanfaatan sumberdaya alam yang makin marak juga merupakan permasalahan tersendiri, seperti nelayan Indonesia yang ditangkap oleh pihak Malaysia. Motif tersebut dikarenakan karena kesejahteraan yang belum memadai sehingga diperlukan pendampingan kepada para nelayan (masyarakat pesisir pantai) untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup salah satunya adalah memberdayakan potensi nelayan dengan membentuk Kelompok Bersama Nelayan dan pada akhirnya akan terbentuk Koperasi Syariah.

Kota Batam memiliki tingkat perkembangan pembangunan yang sangat pesat sejak dijadikan daerah Otorita Batam. Sebagai kawasan yang sedang berkembang Kota Batam tidak terlepas dari permasalahan pengelolaan dan pengembangannya. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan terjadinya tekanan ekologis terhadap sumberdaya pesisir dan laut. Setiap tahunnya terjadi penurunan kualitas dan daya dukung ekosistem pesisir dan laut terutama akibat dari penambangan pasir laut, reklamasi pantai, konversi lahan pesisir serta penangkapan ikan secara destruktif.

Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Matra Laut Tahun 2004 –2014 yang menjelaskan bahwa peruntukan sebagian wilayah Kelurahan Pulau Abang diperuntukkan sebagai kawasan taman nasional, perlindungan terumbu karang dan pengembangan ekowisata. Kelurahan Galang Baru sebagian wilayahnya merupakan kawasan perlindungan mangrove, perlindungan terumbu karang dan budidaya terpadu. Sedangkan Kelurahan Karas sebagian wilayahnya diperuntukkan sebagai kawasan perlindungan mangrove, perlindungan terumbu

<sup>6</sup> DKP Kepri, 2011

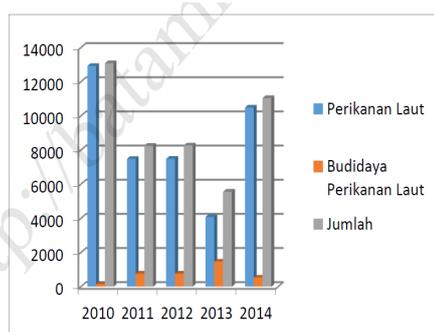
<sup>7</sup> www.batam.go.id

karang, pengembangan perikanan budidaya dan wisata pantai.

Pelaksanaan perundang-undangan dan peraturan daerah tersebut, agar saling sinergis dan selaras maka walikota Batam telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 114/HK/VI/2007 tentang penetapan lokasi Marine Management Area (MMA) Kota Batam yang menetapkan wilayah kawasan konservasi laut daerah, dimana Kota Batam dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya dan bisa mengembangkan hasil laut dengan dukungan beberapa lembaga, seperti lembaga keuangan dengan tujuan permasalahan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat pesisir pantai bisa ditanggulangi.

Salah satu daerah Batam yang memiliki potensi laut yang besar ada di Kecamatan Bulang, daerah yang dikelilingi lautan menjadikan masyarakat di Kecamatan Bulang hampir semua masyarakat berprofesi menjadi nelayan atau mencapai 90% dari jumlah penduduk ataupun pembudidaya hasil laut (terlihat pada gambar dibawah), namun sebagian kecil penduduk di Kecamatan Bulang berprofesi sebagai petani, di antara jenis tanaman antara lain: tanaman pangan, sayur-sayuran, buah-buahan

Gambar 1. Jumlah Produksi Perikanan di Kecamatan Bulang, Kota Batam<sup>8</sup>



Dengan mayoritas jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Bulang, terdapat 4.079 orang Rumah Tangga perikanan laut dan 1.505 orang rumah tangga perikanan budidaya (tertera gambar dibawah).

Gambar 2. Rumah Tangga Perikanan Kecamatan Pulau Bulang (Tahun 2014)<sup>9</sup>

Jenis Budidaya	Banyaknya RTP
(1)	(2)
Perikanan laut	4.079
Perikanan Budidaya	
- Laut	1.505
- Air Tawar	72
Jumlah	5.656

Kehidupan keluarga nelayan khususnya nelayan kecil tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan. Sangat rendahnya tingkat kesejahteraan karena pendapatan yang tidak menentu setiap harinya dan hanya menggantungkan hidupnya terhadap hasil laut menyebabkan mereka digolongkan ke dalam masyarakat miskin. Himpitan ekonomi yang terus menerus mengililingi kehidupan keluarga nelayan kecil menyebabkan kondisi kemiskinan tidak bisa lepas dari kehidupan keluarga nelayan, mereka harus bertahan ditengah keterbatasan ekonomi yang melanda keluarga mereka. Sehingga dari gambar dibawah ini keberadaan lembaga dan sarana perekonomian seperti bank, koperasi dan lembaga lainnya menjadi hal yang tidak begitu penting, dikarenakan kesadaran masyarakat nelayan yang masih belum memahami keberadaan lembaga tersebut.

Gambar 3. Jumlah Sarana Perekonomian menurut Jenisnya di Kecamatan Bulang (Tahun 2014)

Sarana Perekonomian	Jumlah
(1)	(2)
Bank	-
Koperasi	2
Mini Makret/Mall/Plaza	1
Pasar Swalayan	-
Toko	90
Wartel/Warnet	-
Jumlah	93

Sumber : Podes 2014

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menggali lebih dalam tentang apa peran masyarakat nelayan Batam dalam mengembangkan potensi ekonomi sehingga

dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat nelayan.

## B. Landasan Teori

### 1. Kesejahteraan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan

#### a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan menurut Spicker diartikan sebagai “*well-being*” atau kondisi sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata sejahtera, berawalan kata ke- dan berakhiran kata -an. Sejahtera berarti aman sentosa, makmur, dan selamat, artinya terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran. Sosial adalah dari bahasa Inggris yaitu “*social*” yang berarti ramah tamah, senang sekali bergaul, kemasyarakatan. Sosial dari bahasa Latin; *Socius* yang berarti kawan atau teman. Istilah sosial juga berarti sebagai suatu indikasi daripada kehidupan bersama makhluk manusia, umpamanya dalam kebersamaan rasa, berfikir, bertindak dan dalam hubungan antar manusia.<sup>10</sup> Selanjutnya, Edi Suharto mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.<sup>11</sup>

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander, bahwa: “*Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community.*”<sup>12</sup>

10 J.A.Ponsien, dikutip dari T.Sumarnugroho. 1982.

11 Amir, 2009.

12 Dwi Heru Sukoco, 1991.

#### b. Pengertian Pengentasan Kemiskinan

Dimensi kemiskinan dapat dilihat secara ekonomi maupun non-ekonomi. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan dapat dihitung dari konsumsi baik pangan maupun non-pangan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*basic need approach*), diukur dari sisi pengeluaran. Indikator kemiskinan secara internasional, kemiskinan dihitung berdasarkan PPP (*Purchasing Power Parity*) USD 1 per hari per orang, seperti yang selama ini dipergunakan oleh Bank Dunia. Sedangkan indikator kemiskinan secara nasional berdasarkan garis kemiskinan pada tahun 2007, adalah Rp. 166.697 per kapita per bulan. Dalam dimensi non ekonomi, kemiskinan dapat dilihat dari kemampuan seseorang untuk memperoleh akses agar dapat berperan aktif dalam rantai produksi dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari: (1) rendahnya akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, sanitasi dasar, dan sebagainya, (2) rendahnya kapasitas dan produktivitas usaha, keterbatasan akses dana, (3) lemahnya kelembagaan, perbedaan gender, informasi, dan sebagainya, dan (4) tidak adanya rasa aman, hak berbicara, dan lain-lain.<sup>13</sup>

### 2. Nelayan dan Desa Wisata

#### a. Definisi Nelayan

Nelayan dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencaharian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencahariannya.<sup>14</sup> Nelayan merupakan suatu pekerjaan menangkap ikan di laut yang dilakukan oleh seseorang. Kebanyakan orang yang bekerja sebagai nelayan adalah masyarakat yang tinggal di desa pesisir.

Nelayan dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang sederhana, mulai dari pancing, jala, dan jaring, bagan, bubu sampai dengan perahu atau jukung yang

13 Yulaswati, 2008.

14 Ensiklopedia Indonesia, 1983, h. 133.

dilengkapi dengan alat tangkap ikan. Namun dalam perkembangannya nelayan dapat pula dikategorikan sebagai seorang yang profesinya menangkap ikan dengan alat yang lebih modern berupa kapal ikan beserta peralatan tangkapnya yang sekarang dikenal sebagai anak buah kapal (ABK). Di samping itu juga nelayan dapat diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan di tambak dan keramba-keramba di pantai.

Masyarakat nelayan merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja mencari ikan di laut yang menggantungkan hidup terhadap hasil laut yang tidak menentu dalam setiap harinya. Masyarakat nelayan cenderung mempunyai sifat keras dan terbuka terhadap perubahan. Sebagian besar masyarakat nelayan adalah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan rendah dan tidak menentu. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat nelayan harus rela terlilit hutang dan menanggung hidup yang berat, mereka tidak hanya berhutang kepada kerabat dekat, tetapi mereka juga berhutang kepada tetangga dan teman mereka.

Masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan ekonomi penduduk bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumber daya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, pemasok faktor sarana produksi perikanan.<sup>15</sup>

Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya. Definisi masyarakat pesisir yang luas ini tidak secara keseluruhan diambil, tetapi hanya difokuskan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan serta pedagang dan pengolah ikan. Kelompok ini secara langsung mengusahakan dan memanfaatkan sumberdaya ikan melalui

kegiatan penangkapan dan budidaya. Kelompok ini pula yang mendominasi pemukiman di wilayah pesisir di seluruh Indonesia, di pantai pulau-pulau besar dan kecil seantero nusantara. Sebagian besar masyarakat nelayan pesisir ini adalah pengusaha skala kecil dan menengah.<sup>16</sup>

Raymond Firth menjelaskan karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin, yaitu: (a) pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap harinya, (b) rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain, (c) sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar bagi nelayan kepada pedagang atau pengepul hasil tangkapan (produk), (d) besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih bergerak di bidang perikanan kecil-kecilan, dan (e) keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.<sup>17</sup>

Nelayan kecil merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana dan tidak banyak tersentuh oleh teknologi canggih. Wilayah peraian yang dapat diakses oleh nelayan kecil pun tidak sejauh nelayan modern yang menggunakan banyak teknologi canggih, nelayan kecil hanya mampu menjangkau perairan di pinggir-pinggir pantai saja, berbeda dengan nelayan modern yang dapat menjangkau perairan laut sampai jauh di tengah-tengah laut. Berbeda dengan nelayan modern yang acap kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyalasi kondisi over fishing, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi perikanan.

## b. Tipologi Nelayan

ipologi dapat diartikan sebagai pembagian masyarakat ke dalam golongan-golongan menurut kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam tipologi masyarakat nelayan dapat dilihat berdasarkan tiga sudut pandang. *Pertama,*

<sup>16</sup> Nikijuluw, 2002.

<sup>17</sup> Lihat: Bagong dan Karnaji, 2005, h. 60.

<sup>15</sup> Saad dan Basuki, 2004.

dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang dimiliki nelayan. Dalam sudut pandang ini, nelayan bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan nelayan yang mempunyai alat-alat produksi sendiri (pemilik alat produksi) dan golongan nelayan yang tidak mempunyai alat-alat produksi sendiri (nelayan buruh), dalam hal ini nelayan buruh hanya dapat menyumbang jasa tenaganya dalam kegiatan menangkap ikan serta mendapatkan upah yang lebih kecil dari pada nelayan pemilik alat produksi. *Kedua*, dari segi skala investasi modal usahanya. Nelayan yang di pandang dari sudut pandang ini dapat di golongkan menjadi dua tipe, yaitu nelayan besar yang memberikan modal investasi dengan jumlah yang banyak untuk kegiatan menangkap ikan dan nelayan kecil yang hanya bisa memberikan modal investasinya dengan jumlah yang sedikit. *Ketiga*, berdasarkan teknologi peralatan tangkap ikan, nelayan dapat dibedakan menjadi nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern cenderung lebih menggunakan teknologi canggih dan berpendapatan lebih besar dibandingkan dengan nelayan tradisional, ini dikarenakan nelayan modern wilayah produksinya dapat menjangkau perairan yang lebih jauh.<sup>18</sup>

### c. Definisi Desa Wisata

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyaknya jumlah masyarakat miskin di perdesaan, membuat pemerintah membuat banyak program untuk desa. Hampir semua program kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan desa bertujuan untuk perbaikan desa, seperti program pengentasan kemiskinan, perubahan fisik desa dengan bantuan pembangunan infrastruktur, peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat, pemberian pelayanan sosial, peningkatan pemerintahan desa

yang lebih modern, hingga pemberdayaan masyarakat. Perdesaan sering identik dengan keterbelakangan dan kemiskinan. Pembangunan pariwisata diharapkan mampu menjangkau sampai ke perdesaan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh penduduk desa. Selain itu, pariwisata merupakan wahana yang baik untuk pemberdayaan masyarakat dengan adanya konsep desa wisata.

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan dengan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian “desa”, baik dari struktur ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakatnya, serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan seperti akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, dan atraksi-atraksi wisata.<sup>19</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.<sup>20</sup>

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yang dipergunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Metode ini dipergunakan untuk menggali informasi dari masyarakat dan para pihak yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, utamanya dalam pengelolaan desa wisata. PRA seringkali dikenal juga dengan *Participatory Rapid Appraisal*, di mana penekanannya dapat kepada “*participatory*” (partisipasi) dan “*rapid*” (cepat). Penekanan pada kata “*rapid*” adalah lebih pada waktu pengumpulan data dan terbatasnya waktu dalam proses pengembangan atau bahkan dalam implementasi. Istilah lain yang sering juga dipergunakan untuk PRA adalah *Participatory Rapid Rural Appraisal* (PRRA) dan *Participatory Learning Method* (PALM).<sup>21</sup>

19 Pitana, 1999, h. 108.

20 Nuryati, 1993, h. 2-3,

21 Lihat: Chambers 1991, dalam Mukherjee, 2003, h. 30-31.

18 Bagong, 2013, h. 53.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

s data primer teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara, kuisisioner dan observasi.

Wawancara dilakukan dengan teknis *Focus group discussion (FGD)*, yakni sebuah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.<sup>23</sup> Penulis menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok nelayan dengan menggunakan daftar pernyataan yang menyangkut tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati langsung dalam cara mengambil data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>24</sup> Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengamatan secara langsung terhadap masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok nelayan abadi pulau buluh kecamatan pulau bulang kota Batam.

## 3. Populasi dan Sampel

PPopulasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok nelayan pulau buluh kecamatan pulau bulang Kota Batam. Sementara, sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan pulau Buluh yang tergabung dalam kelompok nelayan yang bernama Kelompok Nelayan Abadi Pulau Buluh Kecamatan Pulau Bulang Kota Batam. Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling*, karena masyarakat pesisir tergabung dalam Kelompok Nelayan yang terdaftar secara formal di Dinas Kelautan dan Perikanan

22 Bungin, 2007.

23 Sugiyono, 2011, h. 142.

24 Nazir, 2009.

Kota Batam, dimana ada 5 kelompok nelayan di Pulau Buluh, sehingga peneliti mengambil sampel 1 kelompok Nelayan yaitu Kelompok Nelayan Abadi, dikarenakan paling aktif dan memiliki jumlah kelompok sebanyak 20 orang masyarakat nelayan.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dala Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *Participatory Action Research (PAR)* adalah partisipasi dalam sebuah komunitas untuk mengubah sebagian dari situasi atau struktur sosialnya.<sup>25</sup> Penelitian ini mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis.<sup>26</sup> Dalam PAR seringkali digunakan tiga ciri khusus yang menjadikannya berbeda dengan penelitian konvensional yaitu adanya tanggungjawab bersama atas proyek penelitian, analisis berbasis komunitas dan orientasi menuju tindakan masyarakat.<sup>27</sup>

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Masyarakat Nelayan

Pulau Buluh merupakan salah satu kelurahan di Pulau Bulang yang memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan 0,1 km, dengan luas wilayah kelurahan pulau buluh 5,52 km<sup>2</sup> dengan wilayah darat seluas 2,18 km<sup>2</sup> dan wilayah laut 3,33 km<sup>2</sup>.<sup>28</sup> Kelurahan Pulau Buluh, dari sisi utara berbatasan dengan Kelurahan Sei Binti, dari sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Legong, dari sisi barat berbatasan dengan Kelurahan Bulang Bintang, dan sisi timur berbatas dengan Kelurahan Sei Lekop.<sup>29</sup>

Dari segi pemerintahan, Pulau Buluh memiliki 3 RW dan 11 RT dengan total jumlah penduduk 3.172 jiwa, terdiri dari 1.596 laki-laki

25 Afandi, 2011, h. 69.

26 Faishol, 2006.

27 Denzin, Norman K & Lincoln Yvonna, 2009, h. 439.

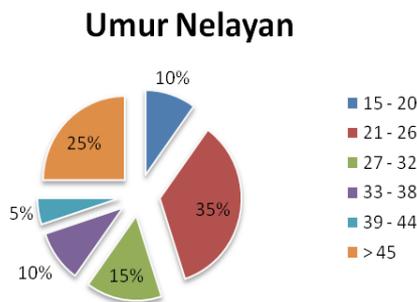
28 Kantor Camat Bulang, 2015,

29 Ibid.

dan 1.576 perempuan. Dari segi agama yang dianut oleh penduduk, Pulau Buluh mayoritas Islam dengan jumlah 2.663 jiwa, agama Katholik sebanyak 76 jiwa, agama Protestan sebanyak 13 jiwa, agama Budha sebanyak 434 jiwa dan agama Khongucu sebanyak 1 jiwa.<sup>30</sup>

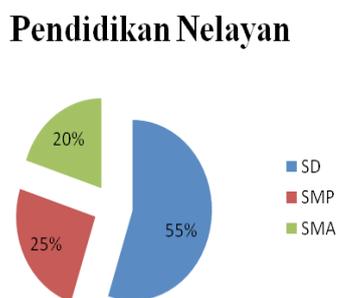
Peneliti berhasil menggali data dari 20 responden dari kalangan masyarakat nelayan, dengan deskripsi sebagai berikut:

Gambar 4. Umur Masyarakat Nelayan



Grafik di atas memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan yang berumur antara 15-20 tahun berjumlah 2 orang (10%), yang berumur antara 21-26 tahun berjumlah 7 orang (35%), yang berumur antara 27-32 tahun sebanyak 3 orang (15%), yang berumur antara 33-38 tahun sebanyak 2 orang (10%), yang berumur antara 39-44 tahun sebanyak 1 orang (5%), yang berumur di atas 45 tahun sebanyak 5 orang (25%), sehingga dapat disimpulkan bahwa umur masyarakat nelayan relatif berusia produktif, yakni 15 – 44 tahun mencapai 75%.

Gambar 5. Pendidikan Masyarakat Nelayan

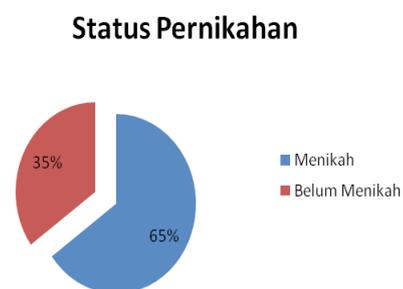


Grafik di atas menjelaskan bahwa masyarakat nelayan yang menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar sebanyak 11 orang (35%), yang menempuh pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama sebanyak 5 orang (25%), yang menempuh pendidikan hingga

30 Ibid.

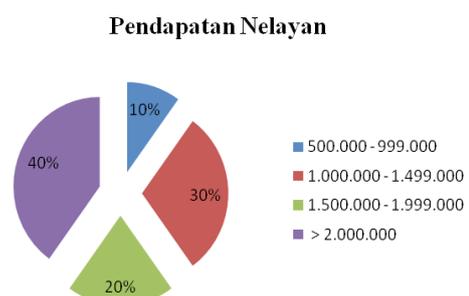
Sekolah Menengah Atas sebanyak 4 orang (20%). Pada umumnya, masyarakat nelayan menempuh pendidikan yang rendah bahkan sekolah dasarpun belum berhasil diselesaikan. Rendahnya masyarakat nelayan yang menempuh ke jenjang yang lebih tinggi, bukan hanya disebabkan oleh ketidakmampuan para orang tua secara materi, tetapi juga karena keinginan dari anak-anak tersebut. Mereka memilih tidak mau melanjutkan sekolah walaupun orangtuanya mampu. Mereka lebih memilih langsung ikut bekerja di laut atau sebagai nelayan. Sebagian dari anak-anak tersebut memilih melaut karena ikut-ikutan temannya yang lain, dan juga mereka melihat anak-anak yang lain mampu mempunyai uang sendiri setelah bekerja melaut. Namun ada juga sebagian orang tua yang menginginkan anaknya untuk membantu bekerja di laut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga terdapat anak-anak yang terpaksa harus meninggalkan bangku sekolahnya.

Gambar 6. Status Pernikahan Masyarakat Nelayan



Grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang sudah menikah sebanyak 13 orang (65%), sedangkan yang belum menikah sebanyak 7 orang (35%). Pada umumnya masyarakat nelayan di Pulau Buluh menikah pada usia yang masih muda.

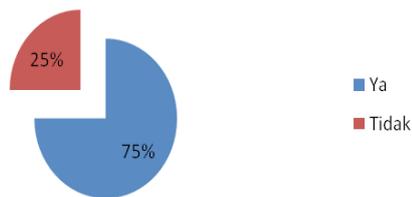
Gambar 7. Pendapatan Masyarakat Nelayan



Grafik di atas menjelaskan bahwa 2 orang nelayan (10%) memiliki pendapatan antara Rp 500.000 - Rp 999.000 perbulan, 6 orang (30%) berpendapatan antara Rp 1.000.000 - Rp 1.499.000 perbulan, 4 orang (20%) berpendapatan antara Rp 1.500.000- Rp 1.999.000 perbulan, 8 orang (40%) berpendapatan di atas Rp 2.000.000 perbulan.

Gambar 8. Masyarakat Nelayan Menerima BLT

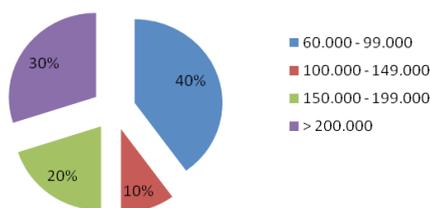
### Menerima BLT



Grafik di atas memperlihatkan bahwa masyarakat nelayan di pulau buluh yang menerima BLT sebanyak 15 orang (75%), sementara 5 orang (25%) sisanya tidak menerima BLT karena pendapatan mereka sudah cukup dan tidak layak untuk mendapatkan BLT atau program subsidi dari pemerintah.

Gambar 9. Pengeluaran Masyarakat Nelayan (Biaya Listrik)

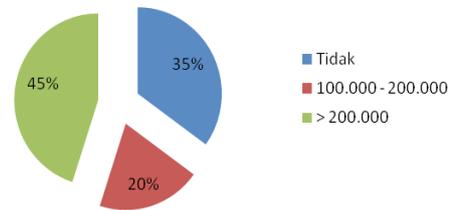
### Pengeluaran - Biaya Listrik



Grafik di atas menunjukkan bahwa pengeluaran biaya listrik para nelayan di antara Rp 60.000 - Rp 99.000 sebanyak 8 orang (40%), di antara Rp 100.000 - Rp 149.000 sebanyak 2 orang (10%), di antara Rp 150.000- Rp 199.000 sebanyak 4 orang (20%), dan yang di atas Rp 200.000 sebanyak 6 orang (30%). Karena mayoritas rumah masyarakat nelayan masih semi permanen dan daya yang dimiliki di bawah 1200 kw sehingga relatif murah dalam membayar listrik.

Gambar 10. Pengeluaran Masyarakat Nelayan (Biaya Arisan)

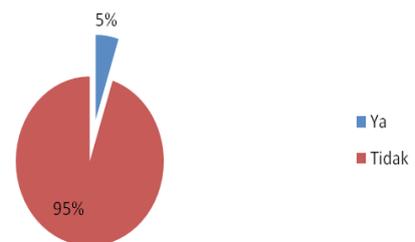
### Pengeluaran - Arisan



Grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang tidak mengikuti arisan sebanyak 7 orang (35%), yang mengikuti arisan antara Rp 100.000 - Rp200.000 sebanyak 4 orang (20%), dan yang mengikuti arisan di atas Rp 200.000 sebanyak 9 orang (45%). Dapat disimpulkan bahwa yang mengikuti arisan di atas Rp 200.000 sebanyak 45% karena masyarakat nelayan menganggap bahwa program ini adalah merupakan program tabungan. Mereka yang belum mengikuti arisan dikarenakan penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

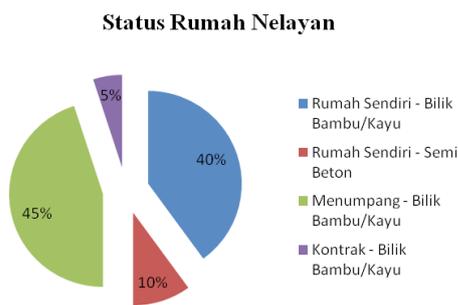
Gambar 11. Pengeluaran Masyarakat Nelayan (Kredit Kendaraan)

### Kredit Kendaraan



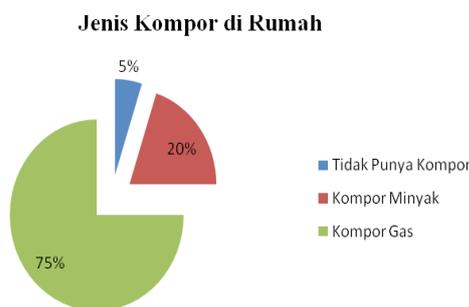
Grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang memiliki kredit kendaraan sebanyak 1 orang (5%), sedangkan 19 orang (95%) lainnya tidak memiliki kredit kendaraan. Masyarakat nelayan yang menggunakan kredit kendaraan adalah ketua kelompok nelayan, yang diperuntukkan untuk keluarga dan akses ke Kota Batam dalam rangka membeli kebutuhan nelayan. Sementara mayoritas masyarakat nelayan tidak menggunakan kendaraan bermotor dikarenakan kondisi pulau yang kecil dan aktivitas mereka full berada dilaut.

Gambar 12. Status Rumah Masyarakat Nelayan



Grafik di atas menjelaskan bahwa masyarakat nelayan yang tinggal di rumah kepemilikan sendiri dan terbuat dari bahan bambu atau kayu sebanyak 8 orang (40%), yang tinggal di rumah kepemilikan sendiri tapi terbuat dari bahan semi beton sebanyak 2 orang (10%), yang masih menumpang sebanyak 9 orang (45%), dan yang mengontrak sebanyak 1 orang (5%).

Gambar 13. Kepemilikan Kompor Masyarakat Nelayan



Grafik di atas menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang tidak memiliki kompor sebanyak 1 orang (5%), yang memiliki kompor minyak sebanyak 4 orang (20%), sedangkan yang memiliki kompor gas sebanyak 15 orang (75%).

Sedangkan Grafik Gambar 14. menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang tidak memiliki perahu sebanyak 3 orang (15%), yang memiliki perahu dayung sebanyak 1 orang (5%), dan yang memiliki perahu bermesin sebanyak 16 orang (80%). Di antara para nelayan tidak ada yang memiliki kapal bermotor. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat nelayan yang tidak memiliki perahu sebanyak 3 orang (15%), yang memiliki perahu dayung sebanyak 1 orang (5%), dan yang memiliki perahu bermesin sebanyak 16 orang (80%). Di antara para nelayan

tidak ada yang memiliki kapal bermotor.

Gambar 14. Kepemilikan Perahu Masyarakat Nelayan



## 2. Model Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Pada aspek output, terlihat terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat miskin, khususnya Kelompok Nelayan Abadi, Pulau Buluh, Kota Batam. Hal ini terwujud karena adanya pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan yang dilakukan Tim Pengabdian Masyarakat STEI SEBI, sekaligus bantuan permodalan baik dari lembaga sosial, pemerintah, dan lembaga donor lainnya. Sedangkan dari sisi kelembagaan sendiri, sudah terlihat mandiri, yang ditandai dengan adanya kemampuan mereka untuk mengelola sendiri Kelompok Usaha Bersama baik secara administrasi maupun pendampingannya.

### a. Penyadaran dan Pengoptimalan Potensi

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Abadi, Pulau Buluh, Kota Batam mulai aktif lagi pada tahun 2013. Namun, pada tahun-tahun sebelumnya nelayan di Pulau Buluh sudah berbentuk komunitas dikarenakan ketua kelompok sebelumnya tidak bisa kerjasama dengan para anggota, salah satu faktor penyebabnya adalah karena kelompok sebelumnya selalu tidak memberikan informasi yang transparan terkait pengelolaan kelompok usaha bersama nelayan. Maka, adanya kegiatan pengabdian masyarakat dari lembaga yang kompeten menjadi penting dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat nelayan, karena proses penyadaran dan pengotimalan menjadi langkah awal, bahwa dengan kelompok bersama

dapat memberikan hasil yang maksimal.

Gambar 15. Proses Penyadaran Masyarakat Nelayan<sup>31</sup>



Setelah mereka sadar akan pentingnya kehadiran Kelompok Usaha Bersama bagi nelayan secara umum dan anggota pada khususnya, maka mereka semangat untuk mengoptimalkan potensi dan bangkit dari kelemahan yang mereka miliki, selain kapasitas mereka pun ditingkatkan. Setelah mereka mempunyai kapasitas, melalui wadah Kelompok Bersama mereka untuk mendapatkan akses pelatihan, pendampingan, bahkan permodalan.

#### b. Penguatan Kelembagaan Kelompok Nelayan Menjadi Koperasi

Setelah berjalan mulai tahun 2012 inisiasi menjadi kelompok Nelayan Bersama di Pulau Buluh dimulai pada tahun 2013. Selama tiga tahun terakhir ini Kelompok Usaha Bersama terus meningkatkan kemandiriannya, terlihat dari hasil *assessment* yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat STEI SEBI, beberapa aset yang sudah dimiliki oleh Kelompok Usaha Bersama Nelayan Abadi, Pulau Buluh, Kota Batam, seperti perahu motor, jaring tangkap, tombak ikan, dan lain sebagainya.

Dengan adanya akses permodalan ini mereka menjalankan usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka selain melaut. Setelah mereka mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat SEBI, diperkirakan pendapatan mereka dapat meningkat, terutama ketika angin tidak menentu, gelombang laut pasang, dan gejala alam lainnya. Pelatihan juga melibatkan para ibu-ibu rumah tangga

yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan diberikan bantuan modal Rp.500.000 dalam bentuk pinjaman *Qbordbul Hasan* (pembiayaan kebajikan) di mana tanpa bunga atau pengembalian sebesar pokok pinjaman.

Selain itu, kemandirian yang telah dicapai dapat dilihat dari beberapa faktor. *Pertama*, Kelompok Usaha Bersama akan menjadi koperasi nelayan dan sudah memiliki sarana yang menjadi tempat untuk pendampingan anggota. *Kedua*, berdasarkan Laporan Keuangan Kelompok Usaha Bersama Nelayan Abadi, aset Kelompok mencapai Rp. 50 juta. *Ketiga*, adanya pengakuan dari aparat Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap peranan Kelompok Usaha Bersama. Karena di lokasi yang infrastrukturnya kurang bagus, usahanya bisa jalan, organisasinya jalan, padahal lokasinya paling jauh.

Program pemberdayaan yang dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama Nelayan Abadi ini memberikan hasil sebagai berikut: (1) proses sosialisasi yang dilakukan secara intensif telah memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk secara berkelompok bangkit dari kondisi kemiskinan, (2) adanya proses pengkapasitasan membuat anggota dan pengelola menjadi lebih siap untuk menjalankan roda organisasi. Anggota menjadi paham tentang hak dan kewajibannya sebagai anggota. Anggota juga menjadi mengerti betapa pentingnya mereka berkelompok, dan (3) adanya proses pemberian daya melalui fasilitas permodalan membuat anggota menjadi semakin berdaya secara ekonomi.

#### E. Penutup

Penelitian ini dilakukan pada satu kelompok di Pulau Buluh dengan nama Kelompok Nelayan Abadi dari 20 anggota masyarakat nelayan mayoritas pada usia yang masih produktif, dengan tingkat pendapatan dibawah Rp 2 juta dan masih memiliki perlengkapan dan peralatan yang tradisional dalam melaut sehingga hasil yang diperoleh belum signifikan.

Pemberdayaan masyarakat nelayan agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi (yaitu menuju usaha agrobisnis) membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan,

31 Dokumen pribadi.

organisasi profesi, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat.

Penguatan peran serta masyarakat nelayan sebagai pelaku pembangunan, karena harus didorong seluas-luasnya melalui program-program pendampingan menuju suatu kemandirian mereka. Di samping itu pula, perlu pengembangan organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang demikian itu, mudah-mudahan dapat membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

#### F. Daftar Pustaka:

- Amir, Rudi. 2009. Pengertian kesejahteraan sosial. <http://rudiamir.blogspot.com/2009/01/pengertian-generasi-muda.html>
- Bagong Suyanto & Karnaji, Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan tak berpihak kepada rakyat miskin, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.
- Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Suplemen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Bahri, Efri S, “Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi” Jakarta: FAM Publishing, 2013

Bahrudinnur. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan, Suatu Penelitian Tentang SDM Dan Kelembagaan di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ensiklopedia Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru, 1983

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Matra Laut Tahun 2004 –2014

Mukherjee, Neela. 2003. Participatory Rural Appraisal: Methodology and Applications. New Delhi: Concept Publishing Company.

Nuryanti, Wiendu. 1993. “Concept, Perspective and Challenges”, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional Mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hanum, Chairina. 2010. Tesis: Pemberdayaan masyarakat Pesisir Berbasis Lingkungan, Studi Kasus Masyarakat Pesisir di Tanjung Gundap Kota Batam. Jakarta: MPKP-FEUI.

#### Website

[www.kotabatam.go.id](http://www.kotabatam.go.id)